



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

**STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, maka perlu dilaksanakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/ Menkes / SK /IX/1990 tentang Syarat -Syarat dan Pengawasan Kualitas Air .
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/ Menkes/PB/ VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :1575/ Menkes /Per /XI / 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 957 /Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 288 /Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum ;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1468 / Menkes/ SK/ XII/2005 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan tahun 2005 – 2009 ;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal 1

Menetapkan Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi petugas kesehatan dan instansi pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Pasal 3

Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. pembentukan jejaring lintas program dan lintas sektor dalam penanganan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
- b. pelatihan fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek;
- c. proses pemician di masyarakat dengan cara kompetisi tingkat dusun, desa dan kecamatan;
- d. evaluasi dan monitoring secara berjenjang.

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek adalah Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang terdiri dari :
 - a. Tim Kelompok Kerja Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten;
 - b. Tim Kelompok Kerja Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan;
 - c. Tim Kelompok Kerja Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa;
 - d. Tim Kelompok Kerja Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dusun/ RW/ Kampung.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Ir.CIPTO WIYONO.MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 31.....

**STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah minum, hygiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi *Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)* tahun 2006, menunjukkan 47 % masyarakat masih berperilaku buang air besar di sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Berdasarkan hasil studi *Basic Human Service (BHS)* di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan (i) setelah buang air besar 12% (ii) setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9 % (iii) sebelum makan 14 % (iv) sebelum memberi makan bayi 7 % dan (V) sebelum menyiapkan makanan 6 % , Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukkan 99,20 % merebus air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebut masih mengandung *Eschericia Coli*.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian penyakit Diare khususnya di Kabupaten Trenggalek tahun 2007 sebesar 16209 dan tahun 2008 sebesar 15203 dari kasus yang ada dengan angka kesakitan 13 per seribu penduduk . Kondisi seperti ini sebetulnya dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu, melalui pendekatan Sanitasi Total . Hal ini di buktikan dengan hasil sudi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare menurun 32 % dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar. Dan 45 % dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, sedangkan 39 % perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintegrasikan ketiga perilaku tersebut, kejadian diare menurun sebesar 94 %.

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang hygiene dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) tahun 2004 – 1009 . Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

Menyadari hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Pelatihan Fasilitator Community Led Total Sanitation (CLTS) pada tahun 2007,2008 yang dilanjutkan pemicuan di 751 komunitas di 57 desa dari 157 desa pada 14 Kecamatan tahun 2008 .

Perlunya Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini, berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sektoral dan subsidi perangkat keras, yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi yang baru dengan melibatkan lintas sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing

masing dengan leading sektor Dinas Kesehatan ,karena sanitasi berbasis masyarakat ini menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku hygiene .

B. Maksud dan Tujuan.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat

C. Pengertian.

- a) **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat** yang selanjutnya disebut sebagai **STBM** adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemicuan.
- b) **Komunitas** merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social berdasakan kesamaan kebutuhan dan nilai - nilai untuk merubah tujuan .
- c) **Open Defecation Free** yang selanjutnya disebut **ODF** adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air sembarangan.
- d) **Cuci Tangan Pakai Sabun** adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi,persiapan makanan/minuman bayi.

Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :

- a) Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
- b) Mencuci tangan pakai sabun.
- c) Mengelola air minum dan makanan yang aman.
- d) Mengelola sampah dengan benar.
- e) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Jamban Sehat adalah Fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengolahan sampah dan limbah rumah tangga .

Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi adalah sebuah program pemicuan untuk merubah perilaku dengan metode aksi kolektif dan merupakan pilihan dan kebutuhan masyarakat setempat.

II. ISU DAN TANTANGAN

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat. Khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya.

Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak dibawah 3 tahun yaitu sebesar 19 % atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (Studi World Bank 2007).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya.

III. STRATEGI KABUPATEN TRENGGALEK

A. Penciptaan Lingkungan yang kondusif

1. Prinsip

- a) Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.
- b) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

2. Pokok kegiatan

- a) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Setempat.
- b) Mengembangkan kapasitas lintas Program dan Lintas Sektor terkait .
- c) Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta .

B. Menimbulkan rasa Kebutuhan dan Memiliki.

Prinsip.

Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

Pokok Kegiatan

- a) Meningkatkan peran Stake holder Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan.
- b) Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang Air Besar) dan dilanjutkan dengan pemecuan perubahan perilaku komunitas.
- c) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat .
- d) Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*Natural Leader*) untuk memfasilitasi pemecuan perubahan perilaku masyarakat.
- e) Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total .

C. Peningkatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar.

Prinsip.

Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pokok Kegiatan .

- a) Meningkatkan kapasitas penyediaan produksi sarana sanitasi yang murah dan terjangkau..
- b) Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat koperasi lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi..

D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management).

Prinsip.

Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.

Pokok Kegiatan

- a) Meningkatkan Pengetahuan dan pembelajaran sanitasi dalam mengembangkan Tehnologi Sanitasi sederhana dan tepat guna.
- b) Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan .

E. Pembiayaan.

1. Prinsip

Melakukan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

2. Pokok Kegiatan.

- a) Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri.
- b) Megembangkan solidaritas sosial (Gotong Royong) .
- c) Menyediakan subsidi diperuntukkan bagi fasilitas sanitasi komunal.

F. Pemantauan dan Evaluasi.

1. Prinsip.

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan dukungan keterlibatan dari unsur pemerintah (Tim Monev STMB)

2. Pokok Kegiatan.

- a) Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat.
- b) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data secara berjenjang.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan – kegiatan lain yang sejenis .

IV. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

A. Rencana Kerja.

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaan untuk mencapai sanitasi total yang disampaikan kepada pemerintah daerah

B. Indikator.

Output :

- a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF).
- b. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
- c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air,sabun,sarana cuci tangan). sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar .
- d. Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
- e. Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

Out Come :

Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku, serta meningkatnya ekonomi penduduk dan menurunkan biaya kesehatan bagi Pemerintah maupun masyarakat .

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN .

TINGKAT	INSTITUSI	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Kabupaten	Pemerintah Kabupaten tim STBM Tingkat Kabupaten.	<ol style="list-style-type: none">1. Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STBM di Kabupaten Trenggalek.2. Membentuk tim STBM, guna menetapkan rumusan kebijakan, strategi dan langkah langkah kegiatan STBM di Kabupaten.3. Mengoptimalkan Tim STBM di Kabupaten.4. Mengkoordinasikan pendanaan dengan tim untuk mengimplementasikan strategi STBM.5. Memberi dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.6. Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat kabupaten mengenai pendekatan baru.7. Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap terupdate secara berkala.8. Melakukan evaluasi kegiatan STBM secara berkala .9. Memberikan reward bagi Desa dan Kecamatan yang berprestasi.
Kecamatan	Pemerintah Kecamatan dan Tim Koordinasi STBM Tingkat Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Camat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STBM di Wilayah Kecamatan.2. Menetapkan rumusan kebijakan, strategi dan langkah langkah kegiatan STBM di Kecamatan.3. Mengoptimalkan Tim STBM di Tingkat Kecamatan.4. Melakukan evaluasi kegiatan STBM secara berkala .5. Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap terupdate secara berkala.

Desa	Tim Kerja STBM Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader – kader desa, guru, dsb untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa .2. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan STBM di Tingkat Desa.3. Memonitor hasil kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan.4. Mengambil alih peng operasi dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab ke atas .5. Memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka.6. Melakukan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Tingkat Desa secara berkala.
RT/Dusun / Kampung	Tim kerja STBM tingkat RT / Dusun / Kampung	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (Gotong Royong).2. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat.3. Menyelesaikan permasalahan konflik masyarakat.4. Mendukung / memotivasi masyarakat lainnya, setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di Lingkungan tempat tinggal.5. Membangun kapasitas kelompok pada alokasi kegiatan STBM .6. Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan .7. Memperkenalkan opsi –opsi teknologi8. Mempunyai strategi pelaksana dan exit strategi yang jelas.

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 April 2009

VI. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

A. Tim Kelompok Kerja Program STBM di Kabupaten Trenggalek.

NO	JABATAN DALAM TIM	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
1	PEMBINA	Bupati Trenggalek. Wakil Bupati Trenggalek.
2	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Trenggalek.
3	WAKIL KETUA I	Ketua BAPPEDA Kabupaten Trenggalek
	WAKIL KETUA II	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek
	SEKRETARIS I	Kepala BAPEMAS.
	SEKRETARIS II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4	BIDANG – BIDANG PERENCANAAN DAN STRATEGI PROGRAM	
	1. KELOMPOK KERJA ODF	
	➤ Koordinator	Kepala Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan
	➤ Anggota	a) Kabid P3 Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek b) Kasi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan c) Kasubag Pemberdayaan pada Bagian Kesra. d) Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinkes e) Kasi Pembinaan ketentraman dan Ketertiban pada SATPOLPP. f) Kasubag Sosial Budaya pada Inspektorat Bappeda. g) Kasi Perumahan pada Perumahan & prasarana Pemukiman h) Bapemas
	2. KELOMPOK KERJA CTPS	
	➤ Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan
	➤ Anggota	a) Kabid Promosi & Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan b) Kasi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan c) Kasi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan d) Kasi Kurikulum TK, SD dan PLB e) Kasubag Peliputan dan Pemberitaan

	<p>3 KELOMPOK KERJA PAM- RT ➤ Koordinator</p> <p>➤ Anggota</p> <p>4. KELOMPOK KERJA SAMPAH RUMAH TANGGA ➤ Koordinator</p> <p>➤ Anggota</p> <p>5. KELOMPOK KERJA LIMBAH RUMAH TANGGA ➤ Koordinator</p> <p>➤ Anggota</p> <p>6. KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI ➤ Koordinator</p> <p>➤ Anggota</p> <p>DUKUNGAN CAPACITY ➤ Koordinator</p> <p>➤ Anggota</p>	<p>Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat.</p> <p>a) Kasi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan</p> <p>b) Ka labkesda pada Dinas Kesehatan</p> <p>c) Kasubag Kesejahteraan Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p> <p>d) Kasi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Kantor Lingkungan Hidup.</p> <p>a) Kasi Sarana Kebersihan. Pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan</p> <p>b) Kasi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan KLB pada Dinas Kesehatan</p> <p>c) Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan.</p> <p>d) Kasi pencegahan, Pengamatan, penyakit dan KLB pada Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Kantor Lingkungan Hidup</p> <p>a) Kasi Pengawasan dan Analisa dampak Lingkungan</p> <p>b) Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kab. Trenggalek</p> <p>c) Kasi Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan</p> <p>Staf Ahli Bupati Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.</p> <p>a) Kepala Inspektorat Kab. Trenggalek</p> <p>b) Kepala dinas Kesehatan Kab. Trenggalek</p> <p>c) Kepala Bappemas Kab. Trenggalek</p> <p>d) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek</p> <p>Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek</p> <p>a) Kabag Administrasi Keuangan pada Asisten Administrasi .</p> <p>b) Kepala Kantor Depag Departemen Agama Kabupaten Trenggalek</p> <p>c) Kwarcab Pramuka Trenggalek</p> <p>d) LSM</p> <p>e) Muslimat NU</p> <p>f) Fatayat</p> <p>g) Kasie UKBM Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Trenggalek.</p>
--	--	--

--	--	--

B. Tim Kelompok Kerja Program STBM di Kecamatan .

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	CAMAT
2	KETUA	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
3	SEKRETARIS	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
4	SEKSI TEHNIS	a) Kepala Puskesmas b) Unsur dari Dinas Pendidikan c) Unsur dari Organisasi Kemasyarakatan d) Petugas Sanitarian Puskesmas e) Unsur dari KUA f) Unsur Tokoh Masyarakat

C. Tim Kelompok Kerja Gerakan STBM di Desa

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Desa
2	KETUA	Ketua LPM.
3	SEKRETARIS	Bidan Desa setempat
4	SEKSI TEHNIS	a) Seksi Pemberdayaan Perekonomian & Pembangunan / Guru setempat b) Unsur Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Trenggalek c) BPD setempat d) Unsur Tokoh Masyarakat e) Seksi Agama. f) Pokja 4 (PKK) g) Seksi 7 LPM

D. Tim Kelompok Kerja Program STBM di Dusun/ RW/ Kampung .

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dusun
2	KETUA	Fasilitator
3	SEKRETARIS	Kader Kesehatan
4	SEKSI TEHNIS	a) Unsur Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Trenggalek b) Perangkat Desa setempat c) Unsur Tokoh Masyarakat

VII. KEGIATAN TIM DALAM Mendukung SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM).

NO	SEKTOR/ DINAS	KEGIATAN

1	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab terhadap manajemen program penanganan STBM di wilayahnya2. Mengumpul, mengolah dan menganalisa data STBM sebagai bahan masukan perkembangan STBM pada Lintas sektor dan lintas Program , khususnya untuk memberi masukan sebagai bahan kebijakan pada pengambil kebijakan tertinggi.3. Dengan lintas sektor dan lintas program melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program STBM di Kecamatan/ Puskesmas dan Desa .4. Meningkatkan pelatihan manajemen dan pembuatan sanitasi sederhana pada fasilitator / tukang.5. Memberikan penyuluhan / Sosialisasi penyakit akibat dari buruknya sarana sanitasi pada Masyarakat dan Sekolah, Madrasah atau Pondok
2	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Di setiap lembaga pendidikan terdapat ruang UKS.2. Dilaksanakan kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah3. Terdapat fasilitas jamban standart , Westafel (tempat cuci tangan), tempat sampah di setiap kelas .4. Di setiap Kecamatan ada lembaga pendidikan sebagai percontohan UKS / Sektap UKS5. Setiap tahun dilakukan lomba Lingkungan Sekolah Sehat se Kabupaten6. Terdapat Sarana Air Bersih pada setiap sekolah.
3	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan MCK Pedesaan dilakukan di lokasi desa yang terdapat sistem jaringan air bersih2. Pembangunan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih pedesaan3. Terdapat HIPPAM di setiap desa yang terdapat pembangunan jaringan air bersih4. Bantuan air bersih pada musim kemarau pada daerah kering5. Bantuan teknis / penyuluhan konstruksi jamban
4	Bagian Humas	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi melalui radio di Seluruh kabupaten Trenggalek terkait kampanye StoPS buang air sembarangan atau STBM2. Memberi Informasi melalui media cetak

		<p>seperti Jawa Pos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sosialisasi Program STBM pada berbagai kelompok kelompok yang ada dimasyarakat se Kabupaten Trenggalek 4. Siaran Keliling
5	Kantor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana MCK di Lingkungan Sekolah ,Institusi, Ponpes,Tempat Tempat Umum. 2. Pembangunan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih pedesaan, untuk mendukung Program STBM. 3. Bantuan teknis / penyuluhan konstruksi jamban
6	Dinas Pemuda,Pariwisata dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya MCK dan Sarana Air Bersih, Penataan buangan air limbah yang Saniter Sarana buangan tempat sampah .
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Badan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalakan adanya sarana MCK di tiap tiap perumahan.. 2. Tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarga 3. Tersedianya tempat sampah . 4. Memberikan penyuluhan STBM di Aseptor.
8	Bagian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. keluarnya Prodak hukum yang berkaitan dengan STBM , dimana yang mencakup tentang 5 pilar yaitu tentang <ol style="list-style-type: none"> a) ODF . b) CTPS. c) PAM – RT. d) Sampah rumah tangga. e) Air Limbah rumah tangga
9	Dinas Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya air bersih . 2. Tertatanya sarana buangan limbah cair dan padat ,sehingga tidak mencemari lingkungan. 3. Tertatanya kandang ternak yang saniter. 4. Higiene peternak diperhatikan. 5. Penyemprotan kandang ,untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh ternak.
10	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan kebiasaan Buang Air Besar di Sungai, khususnya diwilayah perkotaan 2. Ikut mengamankan dan menertibkan hasil tindak lanjut pertemuan dengan lintas sektor yang berkaitan dengan STBM di Masyarakat.

11	Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (Bappemas)	<ol style="list-style-type: none">1. Penggalakan adanya sarana MCK di tiap tiap perumahan di Pedesaan2. Tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarga di setiap rumah Pedesaan3. Tersedia dan tertatanya buangan limbah / sampah keluarga .4. Memberikan penyuluhan STBM di lingkup Pedesaan5. Pelembagaan STBM di setiap Desa6.
12	PKK	<ol style="list-style-type: none">1. Aktif mengikuti gerakan pemicuan yang dilakukan oleh tim StoPS Kabupaten dan Dinas Kesehatan.2. Menyebarkan informasi konsep sanitasi total kepada LSM dan Ormas lain3. Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan STOPS melalui dasawisma .
14	Depag	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan penyuluhan tentang program di Madrasah, MTS, Aliyah, Pondok Pesantren, pada waktu kotbah Jum'at.2. Terdapat fasilitas sarana air bersih ,tempat cuci tangan, pembuangan air limbah dan sampah, Jamban yang sehat di Madrasah, MTS, Pondok Pesantren .
13	Muslimat NU / Fatayat	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan penyuluhan tentang program STBM pada anggota Muslimat NU / Fatayat.
14	Pramuka	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan penyuluhan tentang program STBM di Saka Bakti Husada .
15	Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah	menciptakan usaha dalam bentuk pemberian pinjaman lunak pada anggota untuk membuat sarana Sanitasi sederhana.

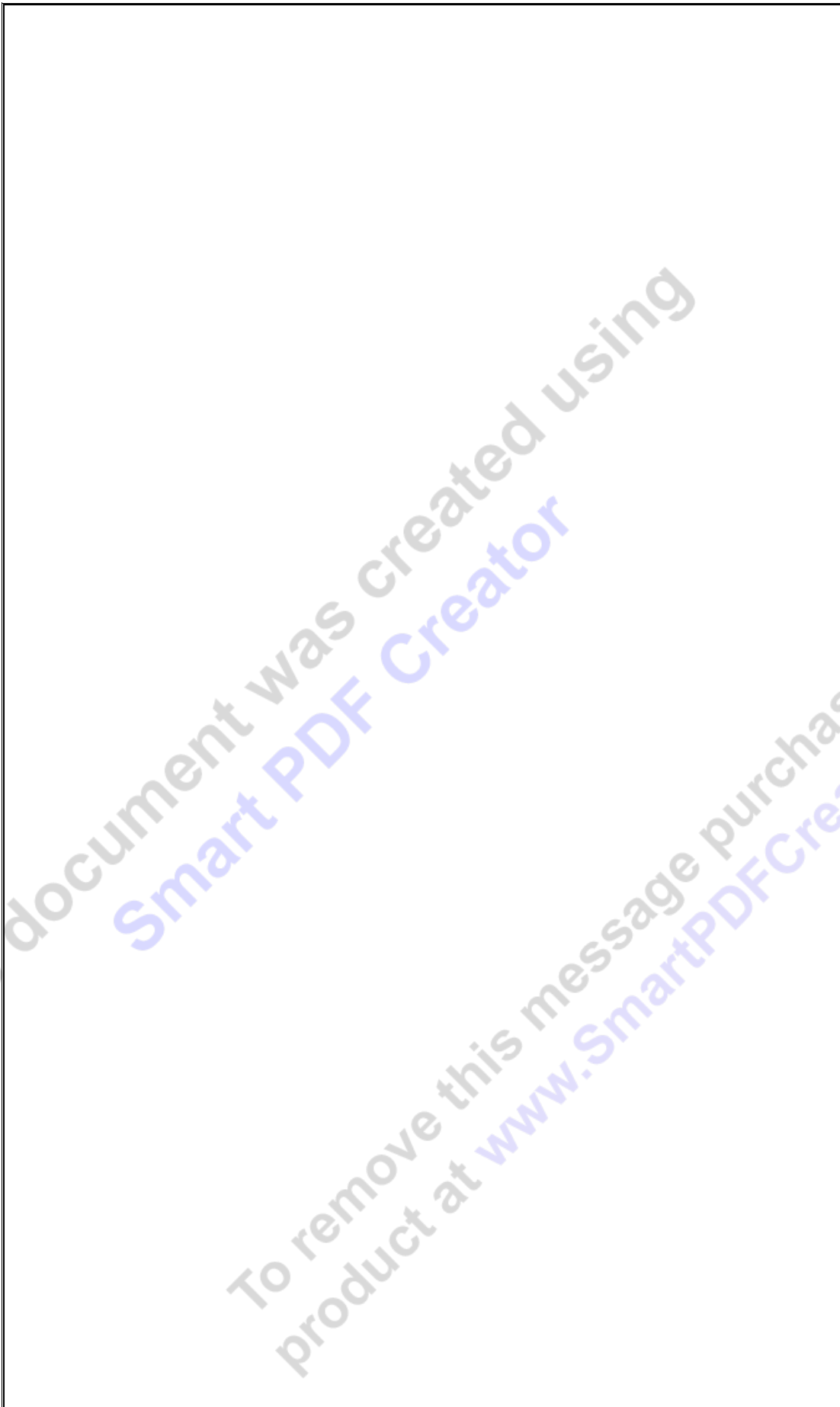
VIII. PENUTUP .

1. Strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten mengandung strategi yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari pada kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL – BM).

2. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan penilaian upaya peningkatan akses sanitasi, baik oleh pemerintah kabupaten, Kecamatan, Desa hingga dusun .Penetapan Strategi dalam pedoman ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat lebih terarah dan terukur .
3. Strategi STBM diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan yang sesuai specific local serta memicu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan, peningkatan penyediaan, dan pengolahan pengetahuan dalam akses sanitasi serta perilaku masyarakat higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi khususnya serta meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya .

BUPATI TRENGGALEK

SOEHARTO



I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.**
- B. Maksud dan Tujuan.**
- C. Pengertian.**

II. ISU DAN TANTANGAN

III. STRATEGI KABUPATEN TRENGGALEK

- A. Penciptaan Lingkungan yang kondusif**
- B. Peningkatan Kebutuhan.**
- C. Peningkatan Penyediaan.**
- D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management).**
- E. Pembiayaan.**
- F. Pemantauan dan Evaluasi.**

IV. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

- G. Rencana Kerja.**
- H. Indikator.**

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN .

VI. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

- I. Tim Koordinasi Program STBM di Kabupaten Trenggalek.**
- J. Tim Teknis Program STBM di Kabupaten Trenggalek.**
- K. Tim Kelompok Kerja Gerakan STBM di Kecamatan .**
- L. Tim Kelompok Kerja Gerakan STBM di Desa**
- M. Tim Kelompok Kerja Gerakan STBM di Dusun/ RW/ Kampung .**

VII. KEGIATAN YANG DILAKUKAN TIM DALAM MENDUKUNG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com